

**PENGGUNAAN ISU KESETARAAN GENDER OLEH
PARTAI *ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND*
DALAM MENGAMPANYEKAN SENTIMEN ANTI-
IMIGRAN DAN ANTI-ISLAM DI JERMAN**

TESIS



Oleh:

Lie, Liliana Dea Jovita

Pembimbing:

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN ISU KESETARAAN GENDER OLEH PARTAI
ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND DALAM MENGAMPANYEKAN
SENTIMEN ANTI-IMIGRAN DAN ANTI-ISLAM DI JERMAN**



Oleh:

Lie, Liliana Dea Jovita

8091901002

Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada

Hari/Tanggal: Kamis, 26 Agustus 2021

Pembimbing Tunggal:



Elisabet A. S. Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lie, Liliana Dea Jovita

NPM : 8091901002

Program Studi : Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Menyatakan bahwa tesis dengan judul

“PENGUNAAN ISU KESETARAAN GENDER OLEH *PARTAI ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND* DALAM MENGKAMPANYEKAN SENTIMEN ANTI-IMIGRAN DAN ANTI-ISLAM DI JERMAN”

adalah benar-benar karya saya di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain yang berkaitan dengan karya saya, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 27 Agustus 2021



Lie, Liliana Dea Jovita

**PENGGUNAAN ISU KESETARAAN GENDER OLEH PARTAI
ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND DALAM
MENGKAMPANYEKAN SENTIMEN ANTI-IMIGRAN DAN
ANTI-ISLAM DI JERMAN**

**Lie, Liliana Dea Jovita (NPM: 8091901002)
Pembimbing: Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.
Magister Hubungan Internasional
Bandung
Agustus 2021**

ABSTRAK

Partai *Alternative für Deutschland* (AfD) merupakan salah satu partai populis sayap kanan di Jerman. Pasca krisis pengungsi yang melanda Jerman pada tahun 2015, Partai AfD mulai menggunakan isu-isu kesetaraan gender dalam kampanye politik mereka. Penelitian dalam tesis ini dilandaskan pada pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana Partai AfD menggunakan isu kesetaraan gender dalam mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam mereka jelang Pemilihan Federal 2017?” Adapun penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana, dengan menganalisis narasi-narasi yang ditemukan dalam Manifesto Partai AfD, ujaran-ujaran politisi partai, dan poster-poster kampanye Partai. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan liberalisme, serta tiga konsep utama yaitu teori partai politik, teori feminisme dan konsep femonasionalisme. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Partai AfD menggunakan isu-isu seperti peran perempuan, kekerasan seksual berbasis gender, serta ketidaksetaraan yang dialami pengungsi dan imigran perempuan, untuk membentuk *framing* bahwa pengungsi dan imigran laki-laki sebagai ancaman terhadap keamanan perempuan, dan Islam sebagai ancaman terhadap budaya dan nilai-nilai Barat.

Kata Kunci: Partai AfD, Kesetaraan Gender, Anti-imigran, Anti-Islam

**THE USE OF GENDER EQUALITY ISSUES BY THE
ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND PARTY TO CAMPAIGN
THE ANTI-IMMIGRANT AND ANTI-ISLAM SENTIMENT IN
GERMANY**

**Lie, Liliana Dea Jovita (NPM: 8091901002)
Supervisor: Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.
Master of International Relations
Bandung
August 2021**

ABSTRACT

The Alternative für Deutschland (AfD) party is a right-wing populist party in Germany. After the refugee crisis that hit Germany in 2015, the AfD Party began to use gender equality issues in their political campaigns. The research in this thesis is based on the research question, namely “how did the AfD Party use the issue of gender equality in their anti-immigrant and anti-Islam campaign ahead of the 2017 Federal Elections?” The research was conducted using the discourse analysis method, by analyzing the narratives contained in the Manifesto of AfD Party, the statements of party politicians, and the party's campaign posters. The analysis was carried out using a liberalism approach, as well as three main concepts, namely political party theory, feminism theory, and femonationalism. The results of the research showed that the AfD Party used issues such as the role of women, gender-based violence, and inequality experienced by female refugees and immigrants, to frame male refugees as a threat to women's security, and Islam as a threat to Western's cultures and values.

Keywords: AfD Party, Gender Equality, Anti-immigrant, Anti-Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis berjudul “Penggunaan Isu Kesetaraan Gender oleh Partai *Alternative für Deutschland* dalam Mengampanyekan Sentimen Anti-Imigran dan Anti-Islam di Jerman” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama dua semester pengerjaan tesis ini,
2. Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D dan Ibu Sylvia Yazid, S.IP, MPPM., Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan komentar dan saran yang sangat membantu dalam pengerjaan tesis ini,
3. Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini,
4. Seluruh dosen-dosen pengajar di Magister Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama masa kuliah,
5. Teman-teman di MHI UNPAR yang telah membantu, menemani, serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala masukan dan kritik yang membangun untuk mendukung agar tesis ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 27 Agustus 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.5.1 Pendekatan Liberalis.....	16
1.5.2 Teori Partai Politik	17
- Konsep Populisme Sayap Kanan	18
- Konsep Migrasi, Anti-Imigran dan Anti-Islam	20
1.5.3 Teori Feminisme	22
- Konsep Posfeminisme	22
- Konsep Kesetaraan Gender	23
1.5.4 Konsep Femonasionalisme.....	24
- Teori Framing	26
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	27
1.7 Sistematika Pembahasan	29

BAB 2 PARTAI AFD	31
2.1 Pembentukan Partai Alternative für Deutschland (AfD)	31
2.2 Partai AfD sebagai Partai Populisme Sayap Kanan	33
2.3 Sentimen Anti-Imigran dan Anti-Islam Partai AfD	36
BAB 3 ISU KESETARAAN GENDER DI JERMAN	43
3.1 Perkembangan Isu Kesetaraan Gender di Jerman	43
3.2 Isu Kesetaraan Gender terkait Pengungsi dan Imigran	51
BAB 4 ANALISIS PENGGUNAAN ISU KESETARAAN GENDER OLEH PARTAI AFD	57
4.1 Penggunaan Isu Kesetaraan Gender dalam Kampanye Partai AfD	57
4.1.1 Peran Perempuan Jerman dalam Kebijakan Partai	58
4.1.2 Kekerasan Seksual Berbasis Gender terhadap Perempuan Jerman	66
4.1.3 Ketidaksetaraan Gender yang Dialami oleh Pengungsi dan Imigran Perempuan	70
4.2 Analisis <i>Framing</i> terhadap Pengungsi dan Imigran Muslim	75
4.3 Hasil Analisis	79
BAB 5 KESIMPULAN	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	91

DAFTAR SINGKATAN

AFD	<i>Alternative für Deutschland</i> (Alternatif untuk Jerman)
BAMF	<i>Bundesamt für Migration und Flüchtlinge</i> (Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi)
BKA	<i>Bundeskriminalamt</i> (Kantor Polisi Kriminal Federal)
CDU	<i>Christian Democratic Union of Germany</i> (Persatuan Demokrat Kristen Jerman)
CEDAW	<i>Committee on Elimination of Discrimination against Women</i> (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita)
CSU	<i>Christian Social Union in Bavaria</i> (Uni Sosial Kristen di Bayern)
EIGE	<i>European Institute for Gender Equality</i> (Institut Kesetaraan Gender Eropa)
EU	<i>European Union</i> (Uni Eropa)
FDP	<i>Free Democratic Party</i> (Partai Demokrat Bebas)
PEGIDA	<i>Patriotic Europeans Against the Islamicisation of the Occident</i> (Patriotik Bangsa Eropa Melawan Islamisasi Barat)
SPD	<i>Social Democratic Party of Germany</i> (Partai Demokrat Sosial Jerman)

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skor Indeks Kesetaraan Gender di Jerman Tahun 2015-2017	45
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 “Jerman Baru? Kami Membuatnya Sendiri.....	64
Gambar 4.2 “Dan Apa Alasan Anda Berjuang untuk Jerman?”	65
Gambar 4.3 “Burka?” Kami Lebih Menyukai Bikini	72
Gambar 4.4 “Burka?” Saya Lebih Menyukai Anggur Merah	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	91
------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Topik terkait kesetaraan gender kembali menjadi perdebatan dalam diskusi seputar krisis pengungsi yang melanda Jerman pada tahun 2015. Perdebatan tersebut didasari adanya argumen bahwa pengungsi, yang mayoritasnya merupakan laki-laki dan berasal dari negara-negara Muslim, dapat menjadi ancaman bagi keamanan perempuan Jerman, hak-hak perempuan, serta nilai-nilai kesetaraan gender lainnya yang telah dipegang oleh masyarakat Jerman. Argumen tersebut semakin diperkuat dengan adanya peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual secara massal yang terjadi pada perayaan Malam Tahun Baru 2015/2016 di Kota Cologne, Jerman. Pada malam tersebut, setidaknya terdapat 1.200 perempuan Jerman yang menjadi korban dari perampokan, intimidasi, hingga pelecehan dan kekerasan seksual, sementara lebih dari 2.000 laki-laki diduga terlibat sebagai pelaku, dengan mayoritas pelaku digambarkan sebagai laki-laki muda dari etnis Arab dan Afrika Utara.¹

Peristiwa Cologne terjadi hanya selang beberapa bulan setelah Pemerintah Jerman, di bawah pimpinan Kanselir Angela Merkel, memberlakukan ‘kebijakan pintu terbuka’ atau ‘*open-door policy*’ sebagai tanggapan atas meningkatnya arus migrasi menuju Eropa. Salah satu kebijakan tersebut adalah menanggukkan

¹ Rick Noack, “Leaked document says 2,000 men allegedly assaulted 1,200 German women on New Year’s Eve,” Washington Post [Online], 11 Juli 2016, diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/07/10/leaked-document-says-2000-men-allegedly-assaulted-1200-german-women-on-new-years-eve/>.

Regulasi Dublin, yakni sebuah regulasi untuk menetapkan negara anggota Uni Eropa (EU) yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengevaluasi permohonan suaka,² bagi pengungsi asal Suriah. Keputusan Pemerintah Jerman tersebut menjadikan Jerman sebagai negara tujuan utama bagi para pencari suaka yang tiba di Eropa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Federal Jerman untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), terdapat sekitar 890.000 pencari suaka yang tiba di Jerman sepanjang tahun 2015.³ Dari jumlah 441.899 permohonan suaka yang terdaftar, 69,2% di antaranya merupakan pencari suaka laki-laki sementara 30,8% lainnya merupakan perempuan.⁴

Peristiwa Cologne menjadi titik-balik dalam perdebatan seputar pengungsi di Jerman, bahkan di Eropa. Beberapa pihak, seperti media massa, politisi, maupun kelompok-kelompok sayap kanan, menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan imbas dari kebijakan Pemerintah Jerman yang dianggap terlalu liberal.⁵ Salah satu pihak yang dengan tegas mengkritik tersebut adalah Partai *Alternative für Deutschland* (AfD), yang merupakan partai populis sayap kanan di Jerman. Partai AfD menginstrumentalisasi peristiwa Cologne untuk menyerang kebijakan pintu terbuka Pemerintah Jerman dan menggambarkan pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan internal Jerman. Partai AfD mengonstruksi persepsi bahwa pengungsi laki-laki dari etnis Arab dan Afrika Utara merupakan orang-orang yang kasar, agresif, dan misoginis, serta mengonstruksi persepsi bahwa Islam – agama mayoritas dari para pengungsi – merupakan agama yang

² UNHCR, “The Dublin Regulation,” diakses dari <https://www.unhcr.org/4a9d13d59.pdf>.

³ BAMF, “Migration Report 2015: Central conclusions”, halaman 8.

⁴ BAMF, “Das Bundesamt in Zahlen 2015: Asyl, Migration und Integration,” (2016), halaman 22.

⁵ Stefanie C Boulila dan Christiane Carri, “On Cologne: Gender, migration and unacknowledged racisms in Germany,” *European Journal of Women’s Studies* 24, no. 3 (2017), halaman 288, DOI:10.1177/1350506817712447.

masih memegang kuat budaya patriarki dan tertinggal dalam hal kesetaraan gender.⁶ Hal tersebut memperlihatkan bahwa peristiwa Cologne, yang semula lebih berfokus pada aksi-aksi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, kemudian digunakan untuk membahas konsep yang lebih luas, seperti kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang dikhawatirkan menjadi terancam dengan keberadaan pengungsi laki-laki Muslim di Jerman.

Tanggapan Partai AfD terhadap peristiwa Cologne tersebut sejalan dengan ideologi populis dan nasionalisme etnis yang dipegang oleh partai. Ideologi populis terlihat dari bagaimana Partai AfD menampilkan diri sebagai perwakilan suara rakyat (*'the people'*) dalam menentang kebijakan suaka yang diberlakukan oleh Pemerintah Jerman (*'the elite'*).⁷ Partai AfD juga menekankan adanya polarisasi antara masyarakat Jerman (*'us'*) melawan pengungsi (*'the Others'*), dengan menganggap bahwa pengungsi yang masuk ke Jerman sebagai 'penyusup' yang dapat mengancam tatanan kehidupan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Kekristenan Eropa dan budaya Barat.⁸ Sementara ideologi nasionalisme etnis memperlihatkan bagaimana kebijakan-kebijakan Partai AfD berfokus pada upaya-upaya untuk melindungi budaya mayoritas bangsa dan menjaga agar negara tetap homogen secara etnis.⁹ Ideologi nasionalisme etnis tersebut menyebabkan adanya sikap eksklusif terhadap para pendatang, yang sering kali diwujudkan melalui sentimen anti-imigran dan anti-Islam Partai AfD.

⁶ Juan-Pablo Cadena Gómez, "The securitization of asylum. An analysis of the impact of the 2015-2016 refugee crisis in asylum policies in Germany," *Global Migration Paper*, no. 22 (2019), halaman 108-109.

⁷ Jens Rydgren, "Radical right-wing parties in Europe: What's populism got to do with it?" *Journal of Language and Politics*, (Juni 2017), halaman 3, DOI: 10.1075/jlp.17024.ryd.

⁸ Maximilian Sprengholz, "Post-feminist German heartland: On the women's rights narrative of the radical right populist party Alternative für Deutschland in the Bundestag," *European Journal of Women's Studies*, (2021), halaman 2, <https://doi.org/10.1177/13505068211007509>.

⁹ Jens Rydgren. *Op.Cit.*, halaman 1.

Sentimen anti-imigran dan anti-Islam Partai AfD semakin terlihat dengan dalam Manifesto Partai AfD untuk Jerman, serta melalui pernyataan atau ujaran politisi-politisi partai dan poster-poster kampanye partai jelang Pemilihan Parlemen Jerman (*Bundestagswahl*) pada September 2017. Salah satu hal menarik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Partai AfD mengangkat isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan untuk memperkuat sentimen anti-imigran dan anti-Islamnya tersebut. Terdapat asumsi bahwa penggunaan isu-isu tersebut merupakan salah satu upaya Partai AfD untuk menarik suara dari kelompok feminis dan kalangan perempuan lainnya. Hal ini menjadi penting untuk dipahami, terlebih karena Partai AfD berhasil meraih perolehan suara terbesar ketiga dalam Pemilihan Parlemen 2017, yaitu dengan total perolehan suara nasional sebesar 12,6% (di belakang CDU/CSU dengan total suara 33% dan SPD dengan total suara 20,5%), dan menjadi partai oposisi utama dalam pemerintahan Jerman.¹⁰ Maka dari itu, penulis memutuskan untuk memilih “Penggunaan Isu Kesetaraan Gender oleh Partai *Alternative für Deutschland* dalam Mengkampanyekan Sentimen Anti-Imigran dan Anti-Islam di Jerman” sebagai judul dari tesis ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Penggunaan isu kesetaraan gender oleh Partai AfD menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dianalisis karena biasanya perjuangan untuk kesetaraan gender tidak diasosiasikan dengan politik sayap kanan. Norma-norma kesetaraan gender dan feminisme secara general bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan

¹⁰ Charles Lees, “The ‘Alternative for Germany’: The Rise of Right-Wing Populism at the Heart of Europe,” *Politics* (38), no. 3 (2018), halaman 296, <https://doi.org/10.1177/0263395718777718>.

spektrum politik ini. Namun, isu kesetaraan gender sebenarnya memiliki posisi penting dalam ideologi populis sayap kanan partai. Hebert Kitschelt, misalnya, berargumen dalam penelitiannya bahwa isu kesetaraan gender ciri khas ideologi partai populis sayap kanan dan dapat menjadi daya tarik elektoral.¹¹ Beberapa studi terdahulu juga menunjukkan bahwa partai-partai sayap kanan populis dapat dicirikan sebagai konservatif sehubungan dengan nilai-nilai keluarga dan peran gender tradisional yang mereka pegang.¹² Contohnya, kebijakan keluarga Partai AfD membahas tentang keluarga sebagai institusi inti masyarakat, peran tradisional perempuan dalam keluarga, penentangan terhadap pernikahan sesama jenis/ homoseksual, dan pelarangan terhadap tindakan aborsi.¹³

Meski demikian, krisis pengungsi 2015 – terutama pasca peristiwa Cologne – mendorong Partai AfD untuk menggunakan isu kesetaraan gender dalam mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam mereka. Salah satu contohnya dapat dilihat melalui pernyataan Ketua Partai AfD periode 2015-2017, Frauke Petry, dalam wawancaranya dengan surat kabar *Kölner Stadt-Anzeiger*. Petry menyatakan bahwa peristiwa Cologne membuktikan bahwa perlindungan hak-hak perempuan sudah tidak lagi terjamin di Jerman (*„und damit der Schutz auch von Frauenrechten in unserem Land nicht mehr gewährleistet“*), tetapi tetap memberikan penekanan pada identitas etnis dari pelaku penyerangan, yaitu laki-laki keturunan Arab dan Afrika Utara (*„eine Gruppe von etwa 2.000 Männern*

¹¹ Hebert Kitschelt dan Anthony J. McGann, *The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997), halaman 20.

¹² Tjitske Akkerman, “Gender and the radical right in Western Europe: a comparative analysis of policy agendas,” *Patterns of Prejudice* (49), no. 1-2 (2015), <http://dx.doi.org/10.1080/0031322X.2015.1023655>, halaman 38.

¹³ AfD, *Program für Deutschland: Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland*, (2016), halaman 41-44.

mutmaßlich arabischer und nordafrikanischer Herkunft”).¹⁴ Pernyataan Petry tersebut di satu sisi memperlihatkan bagaimana Partai AfD menampilkan diri sebagai pihak yang peduli terhadap keamanan dan perlindungan hak-hak perempuan Jerman, sementara di sisi lain membentuk persepsi bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap perempuan Jerman. Selain itu, penggunaan isu kesetaraan gender oleh partai populis sayap kanan seperti Partai AfD juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menyerukan keprihatinan mereka atas emansipasi pengungsi perempuan Muslim di Jerman. Hal ini terlihat melalui larangan penggunaan burka, cadar, atau hijab, yang dianggap sebagai bentuk subordinasi perempuan Muslim terhadap laki-laki Muslim.¹⁵

Penggunaan isu kesetaraan gender oleh Partai AfD untuk memperkuat sentimen anti-imigran mereka merupakan salah satu contoh dari apa yang disebut oleh sosiolog Sara R. Farris sebagai femonasionalisme. Dalam bukunya yang berjudul *“In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism”*, Farris memaparkan bahwa femonasionalisme merujuk pada eksploitasi tema-tema feminisme oleh kelompok-kelompok nasionalis sayap kanan dan neo-liberal dalam kampanye anti-Islam dan anti-imigran mereka, serta partisipasi kelompok feminis dan femokrat tertentu dalam menstigmatisasi laki-laki Muslim di bawah panji ‘kesetaraan gender’.¹⁶ Beberapa ahli menjelaskan bahwa pergeseran fokus kelompok nasionalis dan populis sayap kanan ke tema-tema terkait kesetaraan perempuan seperti yang dilakukan Partai AfD tersebut merupakan upaya untuk

¹⁴ Steven Geyer, “Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof: AfD-Chefin Petry nennt Gewalt Folge falscher Asylpolitik”, *Kölner Stadt-Anzeiger* [Online], 5 Januari 2016, diakses dari <https://www.ksta.de/politik/petry-sote-afd-kritik-an-der-asylpolitik-23356482?cb=1623728220458>.

¹⁵ AfD, *Op.Cit.*, halaman 50.

¹⁶ Sara R. Farris, *In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism*, (Durham dan London: Duke University Press, 2017), halaman 4.

memodernisasi agenda politik mereka dan meningkatkan dukungan suara dari pemilih perempuan.¹⁷ Sementara itu, sebagian lainnya menarik hubungan dengan kasus yang dialami oleh Amerika Serikat, di mana politisi konservatif membingkai perang melawan terorisme pasca 9/11 di Timur Tengah sebagai misi untuk membebaskan perempuan Muslim dari laki-laki Muslim.¹⁸

Meskipun penggunaan isu kesetaraan gender tampak sebagai perkembangan yang positif bagi partai-partai populis sayap kanan dan tanda penguatan norma-norma kesetaraan gender dalam masyarakat, para ahli justru menemukan bahwa alasan dan akibat dari penggunaan isu kesetaraan gender ini jauh dari kebaikan.¹⁹ Sementara partai-partai ini berfokus pada kurangnya kesetaraan gender ketika berbicara mengenai populasi minoritas – khususnya Muslim – mereka justru cenderung menentang ukuran kesetaraan gender secara umum. Selain itu, isu kesetaraan gender juga sering digunakan dalam jenis argumen “*clash of civilization*”, di mana kebijakan logis untuk masalah ketidaksetaraan gender di kalangan pengungsi dan imigran adalah dengan tidak membiarkan mereka masuk, dan dengan demikian mencegah ‘Islamisasi’ budaya mayoritas.²⁰ Hal tersebut kemudian membentuk asumsi bahwa wacana tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan bukan untuk memberikan perlindungan atau akses yang sama terhadap perempuan Muslim, tetapi justru tentang penggunaan perempuan sebagai simbol dari keterbelakangan budaya Muslim.

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian dalam tesis ini berfokus pada bagaimana Partai AfD menggunakan isu-isu kesetaraan gender untuk

¹⁷ Ibid., halaman 2.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Mette C. R. Olsen, *Playing the Gender Card: Femonationalism in Norwegian Immigration and Integration Discourse*, Master Tesis Central European University, (2018), halaman 5.

²⁰ Ibid., halaman 6.

mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam mereka, khususnya yang dilakukan sejak krisis pengungsi yang terjadi tahun 2015, hingga menjelang Pemilihan Parlemen Jerman pada September 2017. Analisis dilakukan dengan berfokus pada bagaimana isu-isu tersebut digunakan untuk membentuk gambaran persepsi (*framing*) terkait pengungsi dan imigran, serta budaya dan ajaran Islam.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian dalam tesis ini dibatasi pada isu-isu kesetaraan gender yang digunakan oleh Partai AfD dalam mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam mereka di Jerman. Partai AfD dipilih sebagai subjek dalam penelitian, karena partai tersebut merupakan partai populis sayap kanan yang sebenarnya bertentangan dengan pandangan feminisme, sehingga menjadi menarik untuk dipahami bagaimana mereka menggunakan isu-isu kesetaraan gender untuk kepentingan kampanye mereka. Sementara itu, objek penelitian akan dibatasi pada narasi-narasi yang dibentuk melalui Manifesto Partai AfD, ujaran-ujaran politisi partai, serta poster-poster kampanye partai.

Adapun analisis dibatasi pada narasi yang dibentuk mulai dari tahun 2015, yaitu ketika krisis pengungsi Eropa mencapai puncaknya, hingga tahun 2017, tepatnya hingga Pemilihan Parlemen Jerman yang diadakan pada September 2017. Pembatasan waktu tersebut dipilih untuk melihat bagaimana Partai AfD memanfaatkan isu-isu kesetaraan gender dalam kampanye politik mereka menjelang Pemilihan Parlemen 2017, di mana Partai AfD berhasil memperoleh hasil yang signifikan sebagai partai yang terbilang baru.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tesis ini adalah, “bagaimana Partai AfD menggunakan isu kesetaraan gender dalam mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam jelang Pemilihan Federal tahun 2017 di Jerman?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Partai AfD menggunakan isu-isu kesetaraan gender dalam mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam mereka, yang tercermin dalam manifesto partai, ujaran politisi partai, dan poster kampanye partai. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami *framing* yang dilakukan oleh Partai AfD terhadap pengungsi dan Agama Islam. Sementara itu, tesis ini sendiri diharapkan dapat berguna untuk menambah literatur tentang penggunaan isu-isu kesetaraan gender dalam partai populis sayap kanan yang masih jarang ditemukan.

1.4 Kajian Literatur

Analisis dalam tesis ini dilakukan dengan berlandaskan pada kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam bentuk artikel jurnal, tesis, ataupun buku, yang membahas tentang topik terkait dengan penelitian dalam tesis ini. Berikut ini adalah pemetaan kajian literatur yang digunakan sebagai landasan dalam membentuk kerangka pemikiran terkait analisis dalam tesis ini.

Partai AfD sebagai Partai Populis Sayap Kanan

Guna menganalisis partai populis sayap kanan seperti Partai AfD, diperlukan adanya pemahaman tentang ideologi populis terlebih dahulu. Menurut Cas Mudde, populisme merupakan sebuah gagasan di mana partai memproklamasikan bahwa mereka, dan hanya mereka, adalah suara dari rakyat (*'the people'*).²¹ Menurut pandangan populis, birokrasi dan politik merupakan kelompok elit (*'the elite'*) yang telah mengkhianati rakyat, melalui kebijakan-kebijakan mereka yang tidak berpihak pada rakyat.

Pembahasan terkait Partai AfD sebagai partai populis tersebut dapat ditemukan pada artikel jurnal berjudul *The populism of the Alternative for Germany (AfD): an extended Essex School perspective* yang ditulis oleh Kim Seongcheol. Dalam artikel tersebut, Kim menjelaskan bagaimana rakyat – atau yang dalam bahasa Jerman disebut *'Das Volk'* – telah menjadi titik fokus dalam wacana Partai AfD yang sudah terlihat dalam manifesto partai untuk Pemilihan Bundestag 2013.²² Sejak 2015, populisme dalam tubuh Partai AfD semakin terlihat jelas, melalui pembentukan polarisasi antara *'Das Volk'* melawan *'Die Altparteien'* (partai-partai lama), di mana Partai AfD kemudian menampilkan diri sebagai perwakilan suara rakyat dalam menentang kebijakan pengungsi Pemerintah Jerman.²³ Hal ini tercermin melalui sentimen anti-imigran partai, serta seruan-seruan dari politisi partai untuk diberlakukannya penutupan perbatasan.²⁴ Artikel yang ditulis oleh Kim ini berguna sebagai landasan dalam memahami

²¹ Cas Mudde, *Populist Radical Right in Europe*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

²² Kim Seongcheol, "The populism of the Alternative for Germany (AfD): an extended Essex School perspective," *Palgrave Communication* (3), no. 5 (2017), halaman 4, DOI: 10.1057/s41599-017-0008-1.

²³ *Ibid.*, halaman 6.

²⁴ *Ibid.*

populisme dalam tubuh Partai AfD, meskipun populisme tersebut hanya digunakan sebatas untuk menjelaskan sentimen anti-imigran partai, dan bukan kaitannya dengan penggunaan isu-isu kesetaraan gender oleh partai.

Hubungan antara Gender dan Partai Sayap Kanan

Artikel jurnal kedua yang digunakan sebagai kajian literatur dalam tesis ini adalah artikel berjudul *Gender and the radical right in Western Europe: a comparative analysis of policy agendas* yang ditulis oleh Tjitske Akkerman. Dalam artikel tersebut, Akkerman menjelaskan bagaimana isu-isu gender secara tradisional penting bagi profil ideologis partai-partai populis sayap kanan, yang tercermin melalui nilai-nilai keluarga dan peran gender tradisional yang digunakan sebagai prinsip dalam membentuk agenda politik partai.²⁵ Ia juga menjelaskan bagaimana partai-partai sayap kanan tersebut cenderung menggunakan gender dalam kaitannya dengan imigran untuk menggambarkan keterbelakangan budaya-budaya non-Barat, khususnya budaya Muslim.²⁶ Dalam analisisnya, Akkerman menggunakan contoh kasus dari partai-partai populis sayap kanan di Perancis, Austria, Swiss, Denmark, dan Belanda. Artikel jurnal yang ditulis oleh Akkerman berguna untuk memahami bagaimana kaitan antara gender dengan partai populis sayap kanan, meskipun artikel ini tidak membahas tentang contoh kasus dari partai populis sayap kanan di Jerman.

Pembahasan mengenai kaitan antara isu kesetaraan gender dengan partai populis sayap kanan di Jerman dapat ditemukan dalam artikel berjudul *On Cologne: Gender, migration, and unacknowledged racism in Germany* yang

²⁵ Tjitske Akkerman, "Gender and the radical right in Western Europe: a comparative analysis of policy agendas," *Loc. Cit.*, halaman 38.

²⁶ *Ibid.*, halaman 40.

ditulis oleh Stefanie C. Boulila dan Christiane Carri. Dalam artikel jurnal tersebut, Boulila dan Carri menganalisis wacana-wacana yang muncul dari kelompok nasionalis anti-feminisme (termasuk kelompok populis sayap kanan), kelompok feminis anti-rasial, serta media-media arus utama di Jerman, untuk mengeksplorasi hubungan antara penyangkalan ras (*race-denial*) dan anti-feminisme. Hasil penelitian menemukan peristiwa Cologne dijadikan sebagai arena politik gender dan seksualitas dari kelompok nasionalis anti-feminisme, dengan mendorong narasi *post-feminism* yang memandang bahwa nilai kesetaraan gender merupakan bagian integral dari masyarakat Jerman, bahwa misoginis telah diatasi dan hanya dapat ditemukan dalam kelompok-kelompok rasial (*the Others*).²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Boulila dan Carri dapat menjadi landasan untuk memahami pandangan *post-feminism* yang umumnya digunakan sebagai argumen partai-partai populis sayap kanan.

Femonasionalisme dalam Partai Populis Sayap Kanan

Penggunaan tema-tema feminisme – seperti isu kesetaraan gender – oleh kelompok populis sayap kanan dalam kampanye anti-imigran dan anti-Islam mereka merupakan salah satu contoh dari femonasionalisme. Konsep femonasionalisme tersebut dapat ditemukan dalam buku berjudul *In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism* yang ditulis oleh Sara R. Farris. Menurut Farris, kelompok femonasionalis mendorong agenda anti-Islam atas nama hak-hak perempuan dengan membingkai Islam sebagai agama yang

²⁷ Stefanie C Boulila dan Christiane Carri, "On Cologne: Gender, migration and unacknowledged racisms in Germany," *Op.Cit.*, halaman 286.

misoginis, serta menyajikan bahwa seksisme dan patriarki merupakan masalah eksklusif dari masyarakat non-Barat atau Muslim (*'the Others'*).²⁸

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Farris terhadap partai nasionalis sayap kanan di Perancis, Belanda, dan Italia; sejumlah cendekiawan, politisi feminis, serta organisasi perempuan terkemuka di tiga tersebut; dan kebijakan neoliberal yang menargetkan imigran non-Barat dalam program integrasi sipil, Farris menemukan bahwa kelompok nasionalis sayap kanan umumnya menginstrumentalisasi kesetaraan gender dalam kampanye anti-imigran mereka, sementara para feminis dan organisasi perempuan mengarahkan kritik utama mereka pada Islam dan bukan pada imigran secara keseluruhan.²⁹ Meski demikian, Farris memaparkan bahwa retorika anti-Islam tersebut umumnya menargetkan populasi imigran non-Barat. Adanya konstruksi oposisi biner antara laki-laki dan perempuan Muslim, yaitu bahwa laki-laki Muslim dikonstruksi sebagai penindas berbahaya (*dangerous oppressor*) sementara perempuan Muslim sebagai korban yang pasif (*passive victim*), kemudian diproyeksikan dan digeneralisasikan pada imigran non-Barat yang umumnya berasal dari negara-negara di luar wilayah Eropa dan Amerika Utara.³⁰ Buku yang ditulis oleh Farris sangat berguna dalam menganalisis penggunaan isu-isu kesetaraan gender oleh Partai AfD dengan menggunakan konsep femonasionalisme.

²⁸ Sara R. Farris, *In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism*, *Op.Cit.*, halaman 1-4.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Diskriminasi berbasis gender terhadap pengungsi dan imigran

Pembahasan tentang konstruksi oposisi biner terhadap imigran laki-laki dan perempuan Muslim diperkuat dengan penelitian dalam artikel jurnal berjudul *Racist mobilization and sexualisation in the 'refugee debate' in Germany* yang ditulis oleh Michaela Köttig dan Johanna Sigl. Dalam analisisnya, Köttig dan Sigl menemukan bahwa wacana tentang kecenderungan laki-laki non-Jerman untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan Jerman merupakan elemen utama dalam perjuangan kelompok sayap kanan dalam melawan pengungsi dan migrasi internasional.³¹ Mereka juga menemukan bahwa kelompok sayap kanan menggunakan analisis rasis tentang kekerasan seksual untuk menciptakan adanya ketakutan akan *'The Great Replacement'*, yaitu kekhawatiran bahwa populasi orang kulit putih Eropa akan digantikan oleh populasi imigran non-Eropa.³² Konstruksi rasisme dan seksual dari 'orang kulit hitam' yang penuh nafsu tersebut juga dilengkapi dengan adanya prasangka terhadap Agama Islam, di mana budaya patriarki yang melekat dalam ajaran Islam dianggap sebagai bentuk pendiskreditan terhadap feminisme, sehingga Islam dipandang sebagai ancaman terhadap budaya Eropa dan identitas nasional.³³ Wacana tersebut dianggap mampu untuk meyakinkan dan memobilisasi sebagian besar masyarakat Jerman, serta menyatukan kelompok rasis, anti-feminis, dan fundamentalis Kristen, dalam melawan pengungsi dan imigran di Jerman. Artikel jurnal ini berguna untuk menjelaskan bagaimana penggunaan isu-isu kesetaraan gender dalam kampanye

³¹ Michaela Köttig dan Johanna Sigl, "Racist mobilization and sexualisation in the 'refugee debate' in Germany," *Journal of Sociology* 56, no. 1 (2020), halaman 78. <https://doi.org/10.1177/1440783319882538>.

³² Ibid., halaman 79.

³³ Ibid., halaman 80

anti-imigran dan anti-Islam dapat menimbulkan adanya diskriminasi berbasis gender terhadap pengungsi dan imigran.

Kajian terhadap literatur-literatur di atas memperlihatkan bahwa partai populis sayap kanan memiliki pandangan bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang sudah tercapai di Jerman, sementara masalah ketidaksetaraan gender maupun kekerasan seksual merupakan masalah eksklusif dari pengungsi dan imigran, serta budaya Islam. Meski demikian, penulis masih menemukan beberapa celah dalam literatur-literatur di atas. Literatur tentang Partai AfD sebagai partai populis sayap kanan umumnya membahas sentimen anti-imigran partai melalui sudut pandang populis dan tidak berfokus pada penggunaan isu-isu gender dalam partai. Literatur tentang hubungan antara gender dan partai populis sayap kanan serta femonasionalisme mulai membahas tentang penggunaan isu-isu gender dalam kampanye politik partai, tetapi pembahasan yang dilakukan tidak meliputi kasus di Jerman. Adapun artikel-artikel jurnal yang membahas tentang kasus di Jerman tidak membahas secara spesifik mengenai penggunaan isu-isu kesetaraan gender oleh Partai AfD. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis melihat bahwa pembahasan tentang penggunaan isu kesetaraan gender oleh Partai AfD masih minim, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dalam tesis ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan dalam melakukan analisis, maka penulis menyusun kerangka teoritis dengan menggunakan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Pendekatan Liberalis, sementara analisis dilakukan dengan menggunakan tiga teori dan konsep besar, yaitu Teori Partai Politik, Teori Feminisme, dan Konsep Femonasionalisme. Dari ketiga teori dan konsep besar tersebut, analisis dikembangkan dengan menggunakan beberapa konsep dan teori lainnya, seperti konsep populisme sayap kanan, konsep migrasi, anti-imigran, dan anti-Islam, konsep posfeminisme, konsep kesetaraan gender, dan teori *framing*.

1.5.1 Pendekatan Liberalisme

Perspektif liberalisme dalam studi Hubungan Internasional menekankan pada pentingnya aktor-aktor non-negara dalam percaturan politik global.³⁴ Hal ini berbeda dengan perspektif realisme yang memandang negara sebagai aktor utama. Liberalisme tidak sepakat dengan pandangan realisme yang menempatkan negara di atas segalanya. Meski Liberalisme tetap menerima pentingnya kehadiran negara dalam sistem internasional, tetapi aktor yang menjadi kunci adalah aktor individu, dan dengan demikian menurut perspektif liberalisme, politik domestik jangan sampai terabaikan.³⁵ Perspektif liberalisme juga menekankan pada pentingnya aksi dan kepentingan individu serta kelompok yang dapat termanifestasikan dalam aksi dan kepentingan negara.³⁶ Pendekatan liberalisme ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis peran partai politik dalam membahas isu-isu internasional seperti migrasi, serta dalam menganalisis isu-isu seperti kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang menjadi pembahasan dalam ranah feminisme liberal.

³⁴ Visensio Dugis, "Liberalisme," dalam *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik* (ed. Vinsensio Dugis), halaman 66, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016).

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., halaman 67.

1.5.2 Teori Partai Politik

Mengutip dari buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang ditulis oleh Prof. Miriam Budiardjo, terdapat beberapa definisi partai politik yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer.

Carl J. Friedrich, dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy* mendefinisikan partai politik sebagai:

“sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.”

(Friedrich, dikutip dalam Budiardjo 2007)

Sementara itu, Sigmund Neumann dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Parties* mendefinisikan partai politik sebagai:

“organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.” (Neumann, dikutip dalam Budiardjo 2007)

Sebuah partai politik dalam negara demokrasi memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.³⁷

Di dunia Barat, partai politik terklasifikasi berdasarkan ideologinya, yaitu partai sayap kiri dan sayap kanan. Partai sayap kiri umumnya memiliki ciri berorientasi pada kemajuan dan perubahan, memperjuangkan kesetaraan untuk lapisan bawah, campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dan menekankan pada pentingnya hak.³⁸ Sementara partai sayap kanan memiliki ciri konservatif, mementingkan *privilege* (kepentingan lapisan atas), berorientasi pada pasar bebas, dan menekankan pada pentingnya kewajiban.³⁹ Namun dalam perkembangannya, di negara Barat yang sudah mapan, ada kecenderungan ideologi ekstrem kiri bergeser ke sisi tengah dan tidak lagi bersifat terlalu kiri, demikian pula dengan ekstrem kanan.⁴⁰ Contohnya adalah Partai Christian Democratic Union (CDU) di Jerman yang menjadi *Center Right*. Sementara Partai AfD, yang menjadi subjek dalam penelitian tesis ini, merupakan contoh dari partai sayap kanan dengan ideologi populis.

Konsep Populisme Sayap Kanan

Menurut Cas Mudde, partai populis sayap kanan saat ini merujuk pada sebuah partai yang ideologinya menggabungkan setidaknya tiga fitur, yakni

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), halaman 405-409.

³⁸ *Ibid.*, halaman 400.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 401.

nativisme, otoritarianisme, dan populisme.⁴¹ Nativisme merupakan kombinasi dari nasionalisme dan *xenophobia*. Nativisme merupakan sebuah ideologi yang menekankan bahwa negara harus dihuni secara eksklusif oleh anggota kelompok asli (“*the nation*”) dan bahwa elemen non-pribumi (“alien”), baik itu merujuk pada orang ataupun ide, secara fundamental telah mengancam negara bangsa yang homogen.⁴² Di Eropa Barat, nativisme ini menargetkan kelompok imigran sebagai elemen non-pribumi yang dianggap sebagai ancaman terhadap bangsa.

Otoritarianisme mengacu pada kepercayaan dalam masyarakat yang diatur secara ketat, di mana pelanggaran terhadap otoritas harus dihukum.⁴³ Hal ini kemudian diterjemahkan dalam hukum dan ketertiban yang ketat, termasuk dalam mengkriminalisasi ‘masalah’ sosial seperti aborsi, narkoba, dan prostitusi. Kriminalitas juga sering kali dihubungkan dengan imigran, bahwa kejahatan akan berkurang jika jumlah imigran juga dibatasi.

Sementara itu, populisme merupakan sebuah ideologi yang menganggap bahwa masyarakat dipisahkan menjadi dua kelompok yang homogen dan antagonis, yaitu ‘rakyat murni’ dan ‘elit korup’, dan yang berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi dari kehendak rakyat.⁴⁴ Politisi populis sayap kanan mengklaim diri mereka sebagai ‘suara dari rakyat’ dan menuduh partai-partai mapan bersekongkol satu sama lain. Ketiga ciri dari ideologi ini sering kali berhubungan dalam propaganda partai-partai populis sayap kanan. Dalam tesis

⁴¹ Cas Mudde, “Populist Radical Right Parties in Europe Today,” dalam *Transformations of Populism in Europe and the Americas: History and Recent Tendencies*, halaman 296, (London: Bloomsbury Academic, 2016).

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

ini, konsep partai populis sayap kanan digunakan untuk menjelaskan bagaimana ideologi-ideologi tersebut terlihat dalam program-program partai.

Konsep Migrasi, Anti-Imigran, dan Anti-Islam

Isu migrasi sering kali menjadi fokus utama dalam partai-partai populis sayap kanan. Migrasi merupakan peristiwa pergerakan manusia dari tempat tinggal asalnya, baik yang dilakukan dengan melintasi perbatasan internasional, maupun hanya di dalam batas-batas suatu negara.⁴⁵ Migrasi dapat terjadi karena adanya keinginan pribadi (*voluntary*) atau karena suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk bermigrasi (*forced migration*). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Faktor-faktor pendorong merupakan situasi atau keadaan yang menyebabkan seorang individu bermigrasi dari tempat asalnya, seperti faktor kemiskinan, overpopulasi, tingkat pengangguran yang tinggi, diskriminasi, konflik bersenjata, perang, hingga bencana alam.⁴⁶ Di sisi lain, faktor-faktor penarik merupakan kondisi yang dapat memicu seseorang untuk bermigrasi ke suatu wilayah atau negara tertentu, seperti tingginya tingkat permintaan tenaga kerja di suatu negara, upah yang tinggi, sistem kesehatan dan edukasi yang lebih baik, penghargaan terhadap hak atas kebebasan, hingga reunifikasi dengan anggota keluarga yang sudah bermigrasi terlebih dahulu.⁴⁷

Orang-orang yang melakukan migrasi biasa disebut dengan istilah migran. Tesis ini tidak menggunakan istilah migran karena cakupannya yang teralalu luas,

⁴⁵ IOM, "Glossary on migration," *IML Series*, No. 34 (2019), halaman. 135.

⁴⁶ Nicole B. Simpson, "Demographic and economic determinants of migration: Push and pull factors drive the decision to stay or move", *IZA World of Labor*, (2017).

⁴⁷ Ibid.

melainkan memfokuskannya pada pengungsi dan imigran ekonomi. Dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 terkait Status Pengungsi, pengungsi didefinisikan sebagai orang-orang yang dengan terpaksa harus melarikan diri dari negara atau tempat tinggal asalnya dan tidak dapat kembali ke sana, dikarenakan adanya rasa takut atas penganiayaan yang disebabkan oleh perbedaan ras, agama, kebangsaan, atau pandangan politik.⁴⁸ Oleh karena penindasan dan penganiayaan yang mereka alami, pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan suaka dari negara-negara yang telah menyetujui dan menandatangani konvensi tersebut, terlebih dengan adanya prinsip *non-refoulement*, yaitu bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara atau tempat di mana ia menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasannya.⁴⁹ Sementara itu, imigran ekonomi pada dasarnya merujuk pada orang-orang yang bermigrasi semata-mata karena alasan ekonomi atau untuk memperbaiki taraf hidup mereka.⁵⁰ Pergerakan migran ini umumnya diatur dalam hukum atau perjanjian antara negara pengirim dan negara penerima, namun ada juga pergerakan yang tidak terkendali (*irregular migration*), yang berada di luar hukum dan perjanjian yang ada. Para migran ini biasanya disebut sebagai imigran gelap/ ilegal.

Sementara itu, anti-imigran merupakan sebuah sentimen yang terlahir dari adanya ideologi etno-nasionalisme, yang melihat bahwa suatu negara dihuni oleh anggota dari etnis yang sama, sehingga orang-orang yang memiliki etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda, dilihat sebagai suatu ancaman. Sebuah gerakan sosial

⁴⁸ UNHCR, "The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol," halaman 3.

⁴⁹ Ibid., halaman 4.

⁵⁰ "UNHCR Global Report 2005," halaman 444.

dapat dikatakan memegang sentimen anti-imigran apabila mereka menuntut adanya pembatasan imigrasi atau bahkan mengusir imigran yang telah ada di negara tersebut.⁵¹ Di Eropa, sentimen anti-imigran ini sering kali dikaitkan dengan sentimen anti-Islam, mengingat pengungsi dan imigran yang datang ke Eropa umumnya berasal dari negara-negara dengan mayoritas pemeluk Agama Islam.

1.5.3 Teori Feminisme

Feminisme merupakan sebuah gagasan untuk membawa perubahan sosial dan mengubah sistem kekuasaan yang dianggap sangat berbasis gender dan patriarki. Secara sederhana, feminisme juga dapat dikatakan sebagai gerakan yang memperjuangkan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Gagasan ini berakar dari pemikiran kaum liberal, yang menekankan individu untuk mempraktekkan otonomi dirinya sendiri.⁵² ‘Hak’ menjadi elemen yang harus diprioritaskan dalam pandangan liberalis, di mana setiap individu berhak mendapatkan kebebasan untuk memilih kebaikan menurut individu itu sendiri. Oleh sebab itu, kelompok feminis juga sering diidentifikasi dengan perjuangannya dalam menjamin hak-hak perempuan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Konsep Posfeminisme

Istilah ‘postfeminisme’ sendiri berasal dari media pada awal 1980-an, dan selalu cenderung digunakan sebagai indikasi pembebasan dari belenggu ideologis

⁵¹ Ivan Light, “Nationalism and Anti-Immigrant Movements,” *Society* (33), no. 2 (1996), DOI: 10.1007/BF02700324, halaman 59.

⁵² Gadis Arivia, “Teori Feminisme” dalam *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), halaman 102.

gerakan feminis yang dianggap sudah ketinggalan zaman.⁵³ Posfeminisme lahir dari gelombang ketiga feminisme, yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran posmodernisme. Salah satu gagasan penting dari posfeminisme adalah bahwa kesetaraan gender itu sebenarnya sudah tercapai dan perempuan telah memiliki akses-akses yang sama seperti laki-laki, sehingga perjuangan kelompok feminisme sudah tidak lagi dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan konsep migrasi dalam tesis ini, posfeminisme digunakan untuk menganalisis argumen Partai AfD bahwa nilai-nilai kesetaraan gender sudah tercapai dalam masyarakat Jerman, tetapi kemudian dapat terancam dengan adanya ancaman dari luar, seperti budaya Muslim para pengungsi dan imigran, yang dianggap masih tertinggal dalam hal kesetaraan gender.

Konsep Kesetaraan Gender

Dalam tesis ini, konsep kesetaraan gender digunakan untuk menganalisis isu-isu kesetaraan gender apa saja yang digunakan oleh Partai AfD dalam kampanyenya. Konsep kesetaraan gender berakar dari gerakan feminisme gelombang pertama, yaitu feminisme liberal, yang memiliki fokus utama pada perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Lebih jauh, konsep ini menekankan pada adanya kesempatan dan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan lain-lain.⁵⁴ Adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini membuat perempuan bebas melakukan apa yang mereka inginkan, serta bebas untuk mengekspresikan diri mereka, tanpa

⁵³ Sarah Gamble, "Postfeminism," dalam *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism* (ed. Sarah Gamble), halaman 38, (New York: Routledge, 2006).

⁵⁴ Gadis Arivia, *Op.Cit.*, halaman 116.

adanya batasan-batasan yang disebabkan oleh jenis kelamin dan peranan gender mereka.

Dalam kaitannya dengan konsep posfeminisme yang digunakan dalam tesis ini, kesetaraan gender bukan lagi menjadi sesuatu yang diperjuangkan, tetapi merupakan nilai yang sudah tercapai dalam kehidupan masyarakat Jerman. Permasalahan ketidaksetaraan gender justru dilihat sebagai permasalahan yang datang dari luar, seperti budaya dan ajaran Muslim yang dibawa oleh pengungsi dan imigran, yang dapat mengancam nilai kesetaraan gender yang sudah terjamin di Jerman.

1.5.4 Konsep Femonasionalisme

Femonasionalisme merupakan sebuah konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan eksploitasi tema-tema feminisme, baik yang dilakukan oleh kelompok nasionalis atau kelompok sayap kanan, kelompok feminis dan femokrat, serta kelompok neoliberal.⁵⁵ Di satu sisi, femonasionalisme menggambarkan upaya-upaya partai sayap kanan dan neoliberal di Eropa yang memanfaatkan kesetaraan gender untuk memperkuat politik rasis dan xenophobia, serta agenda anti-imigran mereka, sementara di sisi lain, femonasionalisme juga merujuk pada keterlibatan tokoh-tokoh feminis dan femokrat terkemuka, dalam membingkai Islam sebagai agama dan budaya yang misoginis.⁵⁶ Dalam tesis ini, penggunaan konsep femonasionalisme lebih berfokus pada analisis terhadap partai populis sayap kanan, daripada tokoh-tokoh feminisme atau kebijakan-kebijakan neoliberal.

⁵⁵ Sara R. Farris, *In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism*, *Op.Cit.*, halaman 4.

⁵⁶ *Ibid.*

Konsep femonasionalisme dianggap lebih tepat dalam menjelaskan masalah penelitian dalam tesis ini ketimbang konsep populisme pada umumnya. Berbeda dengan populisme yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu ‘*us*’ dan ‘*Others*’, femonasionalisme secara lebih spesifik membagi masyarakat ke dalam empat kelompok yang saling bertentangan, yaitu laki-laki kulit putih/ Barat, perempuan kulit putih/ Barat, laki-laki non-kulit putih/ non-Barat, dan perempuan non-kulit putih.⁵⁷ Menurut Farris, populisme memang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelompok sayap kanan menargetkan Muslim dan non-Barat lainnya sebagai musuh masyarakat Barat, namun paham tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana kelompok sayap kanan tidak membingkai pengungsi dan imigran perempuan Muslim dan non-Barat sebagai musuh dengan cara yang sama, tetapi justru membingkai mereka sebagai korban yang perlu mendapatkan pertolongan.

Perbedaan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan non-Barat tersebut memperlihatkan adanya standar ganda dari partai-partai sayap kanan tersebut. Untuk menjelaskannya, Farris menggunakan dua konsep yang dikembangkan oleh para ahli ras kritis, yakni konsep “seksualisasi rasisme” (“*sexualization of racism*”) dan “rasialisasi seksisme” (“*racialization of sexism*”). Seksualisasi rasisme menekankan pada gagasan bahwa rasisme dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, karena bergantung pada stereotip laki-laki dan perempuan Lain (*Others*), yaitu laki-laki sebagai penindas dan ancaman seksual, sementara perempuan sebagai korban dan objek seksual.⁵⁸ Seksualisasi rasisme juga memperlihatkan

⁵⁷ Julia Schuster, “A lesson from ‘Cologne’ on intersectionality: strengthening feminist arguments against right-wing co-option,” *Feminist Theory* 22, no. 1 (2021), DOI: 10.1177/1464700120921077.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 73

bahwa ideologi rasis memiliki keinginan untuk mendominasi *the Others*, melalui fantasi untuk memiliki tubuh perempuan (non-kulit putih / non-Barat) dan memermalukan laki-laki (non-kulit putih / non-Barat) secara seksual. Sementara itu, rasialisasi seksisme memperlihatkan bagaimana rasisme dapat beroperasi melalui penggambaran seksisme dan patriarki sebagai ciri khas dari kelompok *Others* (non-Barat dan Muslim). Stigmatisasi rasis terhadap *Others* tersebut bergantung pada deskripsi budaya *Others* yang dianggap ‘neraka’ seksis bagi perempuan, dan dengan demikian menyiratkan bahaya masuknya praktik seksis tersebut ke Barat, yang dibawa bersama para laki-laki asing yang mengungsi atau bermigrasi ke Barat.

Teori Framing

Guna memahami bagaimana Partai AfD menggunakan isu-isu kesetaraan gender dalam mengampanyekan sentimen anti-imigran dan anti-Islam mereka, maka digunakanlah teori *framing*. Teori *framing* umumnya digunakan dalam penelitian media dan berkaitan dengan teori *agenda-setting*. *Agenda-setting* dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat (*public awareness*) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting, sedangkan *framing* secara sederhana dapat diartikan tentang bagaimana media menempatkan sebuah berita dan memberikan makna tertentu.⁵⁹ Menurut Dietram A. Scheufele, dalam ranah komunikasi politik, framing harus didefinisikan dan

⁵⁹ Adhimurti C. Amalia, “Teori Agenda Setting dan Framing dalam Media Relations,” (2020), diakses dari <https://binus.ac.id/malang/2020/04/teori-agenda-setting-dan-framing-dalam-media-relations/>.

dioperasionalkan atas dasar konstruktivisme sosial.⁶⁰ Media massa memiliki pengaruh yang kuat dengan mengkonstruksi realitas sosial, yaitu dengan membingkai gambaran realitas secara terprediksi dan terpola.⁶¹

Sementara itu, Fairhurst dan Sarr mendeskripsikan *framing* sebagai kemampuan untuk membentuk makna suatu subjek, untuk menilai karakter dan signifikansinya. ‘Membingkai’ suatu subjek berarti memilih satu makna tertentu, atau serangkaian makna, di atas makna-makna lainnya. Dengan membagikan *framing* yang kita bentuk kepada orang lain, maka kita memegang kendali terhadap makna, karena dengan demikian kita menegaskan bahwa interpretasi kita yang harus dianggap nyata di atas kemungkinan interpretasi lainnya.⁶² Goffman kemudian memaparkan bahwa terdapat dua bentuk framework yang menentukan interpretasi, pemrosesan, dan komunikasi di antara orang-orang, yaitu *natural framework* dan *social framework*. Perbedaannya, *natural framework* memandang suatu kejadian sebagai sesuatu yang tidak terarah, tidak berorientasi, dan terjadi tanpa adanya keterlibatan kekuatan sosial (*social force*) dari agen, sementara *social framework* mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa terjadi karena keterlibatan aktor sosial yang dipengaruhi oleh motif dan niat mereka.⁶³

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menekankan pada makna (*meanings*) dan

⁶⁰ Dietram A. Scheufele, “Framing as a Theory of Media Effects,” *Journal of Communication* 49, No.4 (1999), halaman 105, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.

⁶¹ Ibid.

⁶² Annika Reitz, “Political Campaign Strategies of the party Alternative for Germany: A qualitative Study of Posters for the 2017 Federal Election,” (Master Thesis, Jönköping University), halaman 16.

⁶³ Ibid.

pemahaman (*understanding*) dari fenomena, aktivitas, serta proses sosial yang ada.⁶⁴ Analisis juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana, yaitu sebuah metode analisis yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam wacana yang sedang berjalan dan melibatkan interaksi antara pembicara (atau penulis) dan pendengar (atau pembaca) dalam konteks situasional tertentu.⁶⁵ Analisis wacana juga dapat diartikan sebagai analisis bahasa yang digunakan untuk menetapkan aktivitas, perspektif, dan identitas.⁶⁶ Dalam studi Hubungan Internasional dan ilmu politik, metode analisis wacana ini dapat dipakai untuk menganalisis bahasa yang digunakan oleh para aktor politik untuk mengungkapkan persepsi mereka tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dunia dan peran mereka di dalamnya.⁶⁷

Analisis wacana tidak hanya digunakan untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam percakapan langsung saja, tetapi juga bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan. Dalam penelitian tesis ini, wacana yang akan dianalisis berasal dari sumber-sumber data utama, seperti Manifesto Partai AfD untuk Jerman yang dipublikasikan dalam situs web resmi Partai AfD pada tahun 2016, ujaran-ujaran politisi Partai AfD yang dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan oleh media-media Jerman dan unggahan di akun sosial media resmi milik politisi partai, serta poster-poster kampanye Partai AfD yang terdaftar secara resmi. Sementara itu, data yang diperlukan untuk menunjang analisis yang dilakukan merupakan data sekunder, yang terdiri dari buku-buku teori dan konsep,

⁶⁴ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), halaman 62.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 274

⁶⁶ James Paul Gee, *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*, (London dan New York: Routledge, 1999), halaman 4.

⁶⁷ Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit.*, halaman 275.

dokumen resmi lembaga internasional maupun lembaga Pemerintah Jerman, artikel jurnal hasil penelitian terdahulu, dan artikel serta berita yang bersumber dari situs surat kabar *online* di internet.

1.7 Sistematika Pembahasan

Berangkat dari pemaparan mengenai kerangka pemikiran di atas, maka pembahasan dalam tesis ini disusun sebagai berikut.

Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur yang berisi penelitian-penelitian terdahulu terkait kasus yang dianalisis, kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Bab II secara keseluruhan membahas tentang Partai AfD. Pembahasan dibagi ke dalam tiga subbab, yaitu pembentukan Partai AfD, Partai AfD sebagai partai populis sayap kanan, serta sentimen anti-imigran dan anti-Islam Partai AfD.

Bab III membahas tentang perkembangan isu kesetaraan gender di Jerman. Pembahasan di bagi menjadi dua subbab, yaitu perkembangan isu kesetaraan gender di Jerman dan isu kesetaraan gender terkait pengungsi dan imigran.

Bab IV berisi tentang analisis penggunaan isu-isu gender dalam kampanye politik Partai AfD. Pembahasan dibagi ke dalam tiga subbab. Subbab pertama membahas tentang isu kesetaraan gender yang digunakan oleh Partai AfD. Terdapat tiga isu yang dibahas, yaitu peran perempuan dalam kebijakan partai, kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan, dan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh pengungsi dan imigran perempuan. Subbab kedua

membahas tentang *framing* terhadap pengungsi dan Islam yang terbentuk melalui penggunaan isu-isu kesetaraan gender dalam narasi Partai AfD. Subbab terakhir membahas tentang hasil analisis.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Penulis juga menyampaikan saran untuk penelitian-penelitian dengan topik serupa di masa mendatang.